



BERNAS

Pelayan Masyarakat yang Terbaik

OLEH : Y.B. MARGANTORO

Bagian Pertama dari Dua Tulisan

KOTA Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan. Demikian visi pembangunan Kota Yogyakarta, selama dua puluh tahun dari 2005 - 2025. Visi dan misi kota ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 - 2025.

Untuk mewujudkan visi pembangunan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan. Kesembilan misi itu terdiri 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan; 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan; 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa; 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan.

Selanjutnya misi kelima adalah Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya; 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *clean government* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum; 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai; 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas; dan 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Dalam pengantar buku *Best Practices Pemerintah Kota Yogyakarta Periode 2002 - 2007* yang diterbitkan Pemerintah Kota Yogyakarta (2008), maupun dalam berbagai kesempatan, Walikota Yogyakarta H. Herry Zudianto mengemukakan, Kepala Daerah tidak lebih sebagai Kepala Pelayan Masyarakat. Pola pikir birokrasi yang selama puluhan tahun menganggap birokrasi adalah penguasa diupayakan diubah menjadi pola pikir birokrasi adalah pelayan masyarakat.

Dengan posisi pelayan tersebut, maka tujuan birokrasi adalah memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik. Mengubah pola pikir birokrasi dari penguasa menjadi pelayan, dari paternalistik menjadi egaliter disadari bukan tanpa adanya resistensi dari birokrasi itu sendiri. Resistensi muncul dari birokrasi yang telah menikmati posisi yang demikian, dan hal tersebut secara sosiologis merupakan sesuatu yang wajar.

Dalam situasi masyarakat dan birokrasi demikian, diperlukan pemerintahan yang responsif terhadap situasi dan perkembangan di masyarakat. Berbagai kebijakan peningkatan pe-

layanan kepada masyarakat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan yang dimaksudkan sebagai inovasi kebijakan yang bersifat nasional tetapi dalam pelaksanaannya diberikan muatan lokal Kota Yogyakarta: 2) Kebijakan yang merupakan prakarsa Pemerintah Kota Yogyakarta; 3) Kebijakan yang tidak dilakukan oleh setiap daerah Kota/Kabupaten.

Tercatat paling tidak ada 31 penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2003 - 2008 pada berbagai bidang pelayanan. Penghargaan diterima dari presiden, menteri, departemen, gubernur, organisasi, dan media massa. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan telah diakui oleh pemerintah, organisasi maupun media massa, selain tentu saja masyarakat sendiri.

Penghargaan dari Presiden Indonesia antara lain Manggala Bakti Husada (bidang kesehatan, tahun 2003) yang diberikan sebagai Kota Sehat terbaik di tingkat nasional; penghargaan Adipura (bidang lingkungan hidup, tahun 2006 dan 2007) yang diberikan karena Kota Yogyakarta diantara kategori kota besar yang berhasil menjaga kebersihan; penghargaan Investment

Award 2007 (penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, Desember 2007) yang diberikan atas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terbaik terhadap perizinan penanaman modal; penghargaan Satya Lencana (bidang pembangunan pendidikan, Desember 2008) yang diberikan sebagai Walikota Peduli Pembangunan di Bidang Pendidikan.

Delapan best practices

Ada delapan *best practices* yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan termuat dalam buku yang ditulis oleh Sukirno, Kadri Renggono, Budi Santosa Asrori, Zeni, Emiliana Yulianti dan Sugeng Sanyoto tersebut. Ke delapan bidang pelayanan itu adalah *Best Practices* Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan, Pember-



TIAP SENIN

Tercatat paling tidak ada 31 penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2003 - 2008 pada berbagai bidang pelayanan. Penghargaan diterima dari presiden, menteri, departemen, gubernur, organisasi, dan media massa. Ini menunjukkan bahwa pelayanan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan telah diakui oleh pemerintah, organisasi maupun media massa, selain tentu saja masyarakat sendiri.

dayaan Masyarakat, Penyediaan Prasarana Dasar/Infrastruktur Perkotaan, Pengembangan Ekonomi Lokal, Peninggulangan KKN dan Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Publik.

Di bidang pendidikan, Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan *best practices* dengan tujuan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan anak didik, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, serta mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.

Beberapa langkah yang sudah dilaksanakan, mulai tahun 2003 meningkatkan alokasi anggaran pendidikan. Pada tahun 2006 telah dialokasikan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen dari APBD di luar gaji guru. Kemudian menetapkan ambungan jaminan pendidikan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 anggaran jaminan pendidikan ini sebesar Rp 14.302.140.000,-. Program ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Mulai 2003 disediakan anggaran operasional sekolah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas antar-sekolah dan mengurangi kesan masyarakat terhadap adanya sekolah favorit dan nonfavorit.

Langkah lain *best practices* pendidikan adalah dalam melaksanakan seleksi guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT), peningkatan gizi siswa, pengembangan *community college*, penerimaan siswa baru berbasis teknologi informasi, paket kebijakan pendidikan, pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan Taman Pintar.

Mengingat pelaksanaan *best practices* pendidikan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, maka program ini akan dilanjutkan antara lain dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan untuk memberikan payung hukum terhadap beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan. ***

Y.B. Margantoro, Wartawan Harian Bernas Jogja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005